



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1651/DJU/SK/HM.02.3/11/2017**

**TENTANG
PEMENANG LOMBA
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2017**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) tanggal 22 Februari sampai dengan 24 Februari 2017 telah disepakati untuk mengadakan lomba SIPP bagi seluruh pengadilan negeri;
 - b. bahwa lomba SIPP ini diadakan untuk meningkatkan kinerja pengadilan negeri dalam menginput data perkara ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), juga untuk memberikan *reward* kepada pengadilan yang telah mengimplementasikan SIPP dengan baik di satker masing-masing;
 - c. bahwa dalam penilaian lomba SIPP ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melibatkan Satgas SIPP untuk menentukan indikator dan kriteria penilaian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum;
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1001/DJU/SK/HM02.3/6/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMENANG LOMBA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan pengadilan negeri yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pemenang lomba Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2017.

KEDUA : Pemenang dibagi atas 4 kategori berdasarkan jumlah perkara yang masuk di tahun 2016, yaitu :

1. Kategori I : Jumlah Perkara Masuk 0 – 500
 2. Kategori II : Jumlah Perkara Masuk 501 – 1000
 3. Kategori III : Jumlah Perkara Masuk 1001 – 2000
 4. Kategori IV : Jumlah Perkara Masuk 2001 ke atas
- Untuk setiap kategori dipilih 6 pemenang

KETIGA : Skema Penilaian Lomba SIPP adalah sebagai berikut :

1. Lingkup penilaian mencakup seluruh pengadilan negeri yang sudah memiliki basis data di pusat basis data Mahkamah Agung.
2. Data diambil dari basis data yang tersedia di server Mahkamah Agung RI.
3. Data yang dinilai adalah Perkara yang tercatat / register di bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Oktober tahun 2017.
4. Perkara yang dinilai adalah perkara perdata dan pidana (tidak termasuk perkara tilang)
5. Metode Penilaian dilakukan oleh tim penilai dengan menggunakan Aplikasi Penilaian SIPP yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
6. Bobot penilaian lomba SIPP terdiri atas 4 komponen utama yang terbagi atas 33 poin penilaian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Penentuan hasil pemenang yang dilakukan oleh tim penilai bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;

BOBOT PENILAIAN LOMBA SIPP

4 (Empat) Komponen utama	
A. INDIKATOR KINERJA	250 point
B. KEPATUHAN PENGINPUTAN DATA	250 point
C. KELENGKAPAN DATA	250 point
D. <u>VALIDASI DATA</u>	<u>250 point</u>
TOTAL	1000 point

A. INDIKATOR KINERJA

- a.1. Jumlah Rasio Penanganan Perkara
- a.2. Versi Rilis Terakhir

B. KEPATUHAN PENGINPUTAN DATA

- b.1. Pendaftaran Perkara
- b.2. Pencatatan Barang Bukti
- b.3. Penetapan Majelis Hakim, PP dan Jurusita
- b.4. Penetapan Hari Sidang Pertama
- b.5. Penundaan Jadwal Sidang
- b.6. Penginputan Tuntutan
- b.7. Penginputan Putusan Akhir
- b.8. Penginputan Minutasi
- b.9. Minutasi Perkara
- b.10. Permohonan Banding, Kasasi dan PK
- b.11. Pengiriman Berkas Banding, Kasasi dan PK
- b.12. Penyelesaian Perkara
- b.13. Pemberitahuan Putusan / Penetapan

C. KELENGKAPAN DATA

- c.1. Isi Dakwaan / Petitum
- c.2. E-Document Dakwaan/Petitum
- c.3. Data Saksi
- c.4. Isi Amar Tuntutan
- c.5. E-Document Tuntutan
- c.6. Isi Amar Putusan Akhir/Penetapan
- c.7. E-Document Putusan Akhir/Penetapan
- c.8. Data Mediasi
- c.9. Data Diversi

D. VALIDASI DATA

- d.1. Agenda Sidang Terakhir
- d.2. Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir
- d.3. Identitas Pihak
- d.4. Pengisian BHT
- d.5. Pengguna
- d.6. Kelengkapan Jadwal Sidang
- d.7. Standarisasi Penamaan SIPP WEB
- d.8. Penahanan
- d.9. Sisa Biaya Perkara

PEMENANG LOMBA SIPP

KATEGORI I (0~500 Perkara)

NO	PENGADILAN	JUMLAH PERKARA 2016	INDIKATOR KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	VALIDASI	NILAI
1	PENGADILAN NEGERI BONTANG	376	234.29	235.897	246.331	214.848	931.366
2	PENGADILAN NEGERI METRO	277	237.06	217.048	222.772	238.730	915.610
3	PENGADILAN NEGERI MALINAU	231	237.89	200.915	245.068	209.705	893.578
4	PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	242	232.16	213.772	242.308	194.517	882.757
5	PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK	195	237.01	170.144	240.530	233.052	880.736
6	PENGADILAN NEGERI RUTENG	219	230.68	190.644	224.699	231.388	877.411

KATEGORI II (501~1000 Perkara)

NO	PENGADILAN	JUMLAH PERKARA 2016	INDIKATOR KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	VALIDASI	NILAI
1	PENGADILAN NEGERI MADIUN	611	240.14	224.930	208.273	219.476	892.819
2	PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK	521	237.23	201.458	244.910	199.904	883.502
3	PENGADILAN NEGERI MAGETAN	824	237.67	205.449	213.853	224.253	881.225
4	PENGADILAN NEGERI BLORA	591	234.02	206.136	241.896	190.675	872.727
5	PENGADILAN NEGERI KLATEN	695	228.40	200.189	231.321	211.889	871.799
6	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	552	237.07	178.913	229.125	222.541	867.649

KATEGORI III (1001~2000 Perkara)

NO	PENGADILAN	JUMLAH PERKARA 2016	INDIKATOR KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	VALIDASI	NILAI
1	PENGADILAN NEGERI STABAT	1104	224.13	201.242	245.256	237.290	907.918
2	PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI	1347	234.44	201.318	221.611	213.252	870.621
3	PENGADILAN NEGERI KEPANJEN	1825	236.09	175.887	237.913	198.761	848.651
4	PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	1496	239.26	207.099	180.338	215.090	841.787
5	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	1679	222.73	157.600	240.687	216.942	837.959
6	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	1141	224.10	144.346	231.588	221.402	821.436

KATEGORI IV (Lebih dari 2001 Perkara)

NO	PENGADILAN	JUMLAH PERKARA 2016	INDIKATOR KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	VALIDASI	NILAI
1	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	2954	222.13	175.385	193.068	213.595	804.178
2	PENGADILAN NEGERI DENPASAR	2932	214.36	169.572	211.366	202.530	797.828
3	PENGADILAN NEGERI BATAM	2389	216.84	124.156	222.011	215.456	778.463
4	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	3468	212.56	128.718	216.141	186.047	743.466
5	PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	2082	213.59	121.093	219.213	187.463	741.359
6	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2803	222.31	123.217	197.132	188.618	731.277